



**BUPATI TANAH DATAR  
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 2 TAHUN 2017**

*Tentang*

**PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN  
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN TANAH DATAR  
TAHUN 2017**







BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk proses penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tertib diperlukan pedoman untuk proses penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang penyusunannya dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Tanah Datar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 50);

MEMUTUSKAN...



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana kerja pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
11. Badan Anggaran DPRD yang selanjutnya disebut Banggar adalah kelengkapan DPRD yang bertugas untuk menyusun APBD.

Pasal 2

- (1) Pedoman umum Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan pedoman dan kalender kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
- (2) Pedoman umum penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun:
  - a. perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2018;
  - b. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016; dan
  - c. perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

(1) Pedoman ...



Pasal 3

- (1) Pedoman Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. perencanaan dan penganggaran Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
  - b. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
  - c. perencanaan dan penganggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 2 Februari 2017

BUPATI TANAH DATAR

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 2 Februari 2017

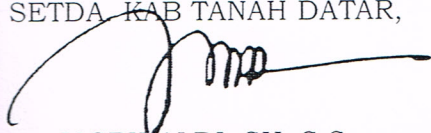
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2017 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB TANAH DATAR,



JASRINALDI, SH, S.Sos  
NIP. 19671130 199202 1 002



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
 NOMOR : 2 TAHUN 2017  
 TENTANG : PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN  
 PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN  
 KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGG UNG JAWAB
I.	Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya	Paling lambat Minggu ke-1 bulan Februari 2017	Badan Keuangan Daerah (BKD)
II.	Penyusunan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2018 dan Penyusunan Renja Perangkat Daerah			
1.	Pembentukan Tim Penyusun RKPD dan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010	Minggu ke-2 s/d minggu ke-3 bulan Januari 2017	BAPERLIT BANG & Perangkat Daerah
2.	Penyusunan Rancangan Awal RKPD	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, Rancangan Awal RKPD Provinsi	Minggu ke-3 s/d minggu ke-4 bulan Januari 2017	BAPERLIT BANG
3.	Penyampaian Surat Edaran Bupati tentang rancangan awal RKPD sebagai pedoman penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah tahun 2018	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, Rancangan Awal RKPD Provinsi	Minggu ke-1 bulan Februari 2017	BAPERLIT BANG

4. Musrenbang ...



NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
4.	Musrenbang Nagari Tahun 2017	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, RPJM Nagari, Perda Nomor 5 Tahun 2010, Perbup Nomor 50 Tahun 2015	Minggu ke-4 bulan Januari s/d minggu ke-3 bulan Februari 2017	Dinas PMDPPKB
5.	Musrenbang Kecamatan Tahun 2017	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, Rancangan Renja Perangkat Daerah, Rancangan RKPD, Hasil Musrenbang Nagari, Perda Nomor 5 Tahun 2010, Perbup Nomor 50 Tahun 2015	Minggu ke-4 bulan Februari s/d minggu ke-1 bulan Maret 2017	BAPERLIT BANG
6.	Forum Internal Perangkat Daerah Tahun 2017	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, Rancangan Renja Perangkat Daerah, Rancangan Awal RKPD, Hasil Musrenbang Kecamatan	Minggu ke-2 bulan Maret 2017	Perangkat Daerah
7.	Forum Perangkat Daerah Tahun 2017	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, Rancangan Renja Perangkat Daerah, Rancangan Awal RKPD, Hasil Musrenbang Kecamatan, Perda No. 5 Tahun 2010, Perbup No. 50 Tahun 2015	Minggu ke-3 bulan Maret 2017	BAPERLIT BANG

8. Penyusunan ...



NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
8.	Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2018	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, Rancangan Awal RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, Rancangan Renja Perangkat Daerah	Minggu ke-3 s/d minggu ke-4 bulan Maret 2017	BAPERLIT BANG
9.	Musrenbang Kabupaten Tahun 2017	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, Rancangan Renja Perangkat Daerah, Rancangan RKPD, Hasil Musrenbang Kecamatan, Hasil Forum Perangkat Daerah, Perda Nomor 5 Tahun 2010, Perbup Nomor 50 Tahun 2015	Minggu ke-4 bulan Maret 2017	BAPERLIT BANG
10.	Perumusan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2018	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, Rancangan RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, Rancangan Renja Perangkat Daerah, Rancangan RKPD, Hasil Musrenbang Kabupaten	Minggu ke-1 bulan April s/d minggu ke-2 bulan Mei 2017	BAPERLIT BANG
11.	Penyampaian Ranperbup tentang RKPD Tahun 2018 ke Gubernur untuk difasilitasi	Permendagri Nomor 80 Tahun 2015	Minggu ke-2 bulan Mei 2017	BAGIAN HUKUM SETDA
12.	Penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2018	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010	Minggu ke-4 bulan Mei 2017	BAPERLIT BANG
13.	Penetapan Renja Perangkat Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010	Minggu ke-1 bulan Juni 2017	PERANGKAT DAERAH

III. Penyusunan ...



NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
III.	Penyusunan KU dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2018			
1.	Penyusunan Rancangan KU dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2018	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya serta peraturan terkait lainnya	Paling lambat minggu ke-1 bulan Juni 2017	BAPERLIT BANG
2.	Penyampaian Rancangan KU dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2018 oleh TAPD kepada Bupati	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya serta peraturan terkait lainnya	Minggu ke-1 bulan Juni 2017	BAPERLIT BANG
3.	Penyampaian Rancangan KU-PPAS APBD Tahun Anggaran 2018 oleh Bupati kepada DPRD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya serta peraturan terkait lainnya	Minggu ke-2 bulan Juni 2017	BAPERLIT BANG
4.	Pembahasan Rancangan KU dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2018 antara TAPD dengan Banggar DPRD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya serta peraturan terkait lainnya	Minggu ke-3 s/d minggu ke-4 bulan Juni 2017	BAPERLIT BANG
5.	Penetapan Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD Tahun 2018	Hasil Pembahasan TAPD dan Banggar DPRD	Paling lambat minggu ke-4 bulan Juli 2017	BAPERLIT BANG
IV.	Penyusunan RKA- Perangkat Daerah Tahun 2018			
1.	Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan RKA Perangkat Daerah dan RKA-PPKD	Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2018	Minggu ke-4 bulan Juli 2017	BKD
2.	Penelitian dan Pembahasan RKA Perangkat Daerah dan RKA PPKD	Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2018, Pedoman Penyusunan RKA-Perangkat Daerah	Minggu ke-1 s/d minggu ke-2 bulan Agustus 2017	BKD
V.	Penyusunan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dan Ranperbup tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018			BKD
1.	Penyusunan Ranperda APBD TA 2018 dan Nota Keuangan APBD Tahun Anggaran 2018	Pedoman Penyusunan APBD TA 2018, Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2018	Minggu ke-4 bulan Agustus 2017	BKD

2. Penyampaian ...



NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
2.	Penyampaian Ranperda APBD Tahun Anggaran 2018 oleh PPKD kepada Bupati	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya	Minggu ke-2 bulan September 2017	BKD
3.	Penyampaian Ranperda APBD Tahun Anggaran 2018 dan Nota Keuangan oleh Bupati kepada DPRD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Minggu ke-3 bulan September 2017	BKD
4.	Pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2018 antara TAPD dengan Banggar DPRD	Pedoman Penyusunan APBD TA 2018, Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2018	Minggu ke-2 bulan Oktober s/d minggu ke-1 bulan November 2017	BKD
5.	Keputusan Bersama antara Bupati dan DPRD tentang Ranperda APBD	Hasil Pembahasan Ranperda APBD antara TAPD dan Banggar DPRD	Minggu ke-2 bulan Oktober 2017	BKD
6.	Evaluasi Ranperda APBD Tahun Anggaran 2018 oleh Gubernur	Keputusan Bersama antara Bupati dan DPRD tentang Ranperda APBD	Minggu ke-3 bulan November s/d minggu ke-1 bulan Desember 2017	BKD
7.	Penyempurnaan Ranperda APBD Tahun 2018 berdasarkan hasil evaluasi Gubernur	Hasil Evaluasi Gubernur	Minggu ke-2 bulan Desember 2017	BKD
8.	Penetapan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2018 menjadi Perda APBD tahun Anggaran 2018 dan Penetapan Ranperbup Penjabaran APBD Tahun 2017 menjadi Perbup Penjabaran APBD Tahun 2017	Pedoman Penyusunan APBD TA 2018, Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2018	Paling lambat minggu ke-3 bulan Desember 2017	BKD

VI. Penetapan ...



NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
VI.	Penetapan DPA Perangkat Daerah dan DPA PPKD Tahun Anggaran 2018			
1.	Penyusunan DPA Perangkat Daerah dan DPA PPKD	Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan DPA-Perangkat Daerah, DPA PPKD Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2018, Peraturan Daerah tentang APBD TA 2017 tentang Penjabaran APBD TA 2018	Paling lambat minggu ke-1 bulan Januari 2018	BKD
2.	Penelitian DPA-Perangkat Daerah dan DPA PPKD oleh Tim Peneliti DPA- Perangkat Daerah dan DPA PPKD	DPA- Perangkat Daerah, Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan DPA-Perangkat Daerah, Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2018, Peraturan Daerah tentang APBD TA 2018	Minggu ke-2 s/d minggu ke-3 bulan Januari 2018	BKD
3.	Pengesahan DPA Perangkat Daerah	DPA- Perangkat Daerah, DPA PPKD KU PPAS APBD TA 2018, APBD TA 2018	Minggu ke-3 bulan Januari 2018	BKD

Keterangan:

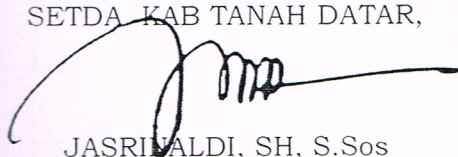
Kalender kegiatan ini akan mengalami penyesuaian dalam pelaksanaannya dengan mengikuti pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan/atau belum diterbitkannya Pedoman Teknis oleh Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan RAPBD 2018.

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB TANAH DATAR,



JASRIWALDI, SH, S.Sos  
NIP. 19671130 199202 1 002



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
 NOMOR : 2 TAHUN 2017  
 TENTANG : PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN  
 PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH

PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN  
 ANGGARAN 2016

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGG UNG JAWAB
1.	Rekonsiliasi Laporan Keuangan TA 2016 antara Perangkat Daerah dengan PPKD	Peraturan Daerah APBD TA 2016, Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Minggu ke-1 s/d minggu ke-2 bulan Januari 2017	BKD
2.	Penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah TA 2016 kepada Bupati melalui PPKD	Peraturan Daerah tentang APBD TA 2016, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Minggu ke-1 s/d minggu ke-2 bulan Januari 2017	BKD
3.	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2016 oleh Bupati kepada BPK	Peraturan Daerah APBD TA 2016, Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Paling lambat Tanggal 31 Maret 2017	BKD



NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
4.	Pemeriksaan oleh Tim BPK	Peraturan Daerah APBD TA 2016, Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Minggu ke-4 bulan Januari s/d minggu ke-2 bulan Mei 2017 - <u>Pemeriksaan Pendahuluan</u> : Minggu ke 4 Januari s/d Minggu 1 bulan Maret. - <u>Pemeriksaan Terinci</u> : Minggu ke 1 April s/d Minggu 2 bulan Mei.	BKD
5.	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2016 oleh BPK	Peraturan Daerah tentang APBD TA 2016, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Minggu ke-1 bulan Juni	BKD
6.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA 2016 (Nota Pertanggung jawaban Keuangan TA 2016) oleh Bupati kepada DPRD	Peraturan Daerah tentang APBD TA 2016, Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Paling lambat minggu ke-2 bulan Juni	BKD
7.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA 2016 dengan DPRD	Peraturan Daerah tentang APBD TA 2016, Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Paling lambat minggu ke-3 s/d minggu ke 4 bulan Juni	BKD

8. Pendapat Akhir ...

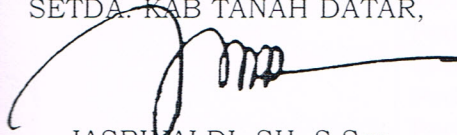
NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
8.	Pendapat Akhir DPRD dan Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban, Pelaksanaan APBD TA 2016	Peraturan Daerah tentang APBD TA 2016, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Minggu ke-1 bulan Juli	BKD
9.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan APBD TA 2016 oleh Gubernur	Peraturan Daerah tentang APBD TA 2016, Peraturan Daerah Daerah tentang Perubahan APBD TA 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Minggu ke-2 s/d minggu ke 4 bulan Juli	BKD
10.	Penetapan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan APBD TA 2016.	Peraturan Daerah tentang APBD TA 2016, Peraturan Daerah Daerah tentang Perubahan APBD TA 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Minggu ke-1 bulan Agustus	BKD

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA. KAB TANAH DATAR,



JASRIALDI, SH, S.Sos  
NIP. 19671130 199202 1 002



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
 NOMOR : 2 TAHUN 2017  
 TENTANG : PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN  
 PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH

PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
I.	Penyusunan Rancangan KU dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017			
1.	Penyusunan Rancangan KU dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017	Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya, Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017	Minggu ke-3 s/d ke-4 bulan Juli 2017	BAPERLIT BANG
2.	Penyampaian Rancangan KU dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 oleh TAPD kepada Bupati	Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya, Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017, Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017	Minggu ke-1 bulan Agustus 2017	BAPERLIT BANG
3.	Penyampaian Rancangan KU dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 oleh Bupati kepada DPRD	Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya, Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017, Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017	Minggu ke-1 bulan Agustus 2017	BAPERLIT BANG

4. Pembahasan ...

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
4.	Pembahasan Rancangan KU dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 antara TAPD dengan Banggar DPRD	Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya, Pedoman penyusunan Perubahan APBD TA 2017	Minggu ke-2 bulan Agustus 2017	BAPERLIT BANG
5.	Penetapan Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2017	Hasil Pembahasan Rancangan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2017	Minggu ke-2 bulan Agustus 2017	BAPERLIT BANG
II.	Penyusunan RKA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017			
1.	Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan RKA Perangkat Daerah dan DPPA Perubahan APBD Tahun 2017	Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2017	Minggu ke-2 bulan Agustus 2017	BKD
2.	Penyusunan dan Penelitian RKA Perubahan Perangkat Daerah	Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2017, Surat Edaran Bupati perihal Pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah dan DPPA Perubahan APBD TA 2017	Minggu ke-3 s/d ke-4 bulan Agustus 2017	BKD
III.	Penyusunan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Ranperbup Penjabaran Perubahan APBD TA 2017			
1.	Penyusunan Ranperda Perubahan APBD TA 2017 dan Nota Keuangan Perubahan APBD TA 2017	Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2017, Perubahan RKPD tahun 2017, Pedoman Penyusunan Perubahan APBD TA 2017	Minggu ke-1 bulan September 2017	BKD
2.	Penyampaian Ranperda Perubahan APBD Tahun 2017 oleh PPKD kepada Bupati	Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2017, Perubahan RKPD tahun 2017, Pedoman Penyusunan Perubahan APBD TA 2017	Minggu ke-1 bulan September 2017	BKD

3. Penyampaian ...



NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
3.	Penyampaian Ranperda Perubahan APBD Tahun 2017 oleh Bupati kepada DPRD	Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2017, Perubahan RKPD tahun 2017, Pedoman Penyusunan Perubahan APBD TA 2017	minggu ke-2 bulan September 2017	BKD
4.	Pembahasan Ranperda Perubahan APBD TA 2017 antara TAPD dengan Banggar DPRD	Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2017, Perubahan RKPD 2017, Pedoman Penyusunan Perubahan APBD TA 2017	minggu ke-3 s/d ke-4 bulan September 2017	BKD
5.	Keputusan Bersama antara Bupati dan DPRD tentang Ranperda Perubahan APBD	Hasil Pembahasan Ranperda Perubahan APBD TA 2017 antara TAPD dengan Banggar DPRD	minggu ke-4 bulan September 2017	BKD
6.	Penyampaian Ranperda Perubahan APBD TA 2017 untuk dievaluasi oleh Gubernur	Keputusan Bersama antara Bupati dan DPRD tentang Ranperda Perubahan APBD	Minggu ke- 1 bulan Oktober 2017	BKD
7.	Penetapan hasil evaluasi Ranperda Perubahan APBD TA 2017 oleh Gubernur	Keputusan Bersama antara Bupati dan DPRD tentang Ranperda Perubahan APBD	Minggu ke-3 bulan Oktober 2017	BKD
8.	Penyempurnaan Ranperda Perubahan APBD TA 2017 sesuai hasil evaluasi Gubernur	Hasil evaluasi Gubernur atas Keputusan Bersama antara Bupati dan DPRD tentang Ranperda Perubahan APBD	Minggu ke-4 bulan Oktober 2017	BKD
9.	Penetapan Ranperda Perubahan APBD TA 2017 menjadi Perda Perubahan APBD TA 2017 dan Penetapan Ranperbup Penjabaran Perubahan APBD TA 2017 menjadi Perbup Penjabaran Perubahan APBD TA 2017	Penyempurnaan Ranperda Perubahan APBD TA 2017 sesuai hasil evaluasi Gubernur	Minggu ke-4 bulan Oktober 2017	BKD

IV. Penetapan ...

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
IV.	Penetapan DPPA Perangkat Daerah Tahun 2017			
1.	Penyusunan DPPA Perangkat Daerah Tahun 2017	Surat Edaran Bupati tentang Penyusunan DPPA-Perangkat Daerah, Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2017, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2017, Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2017	Minggu ke-1 bulan November 2017	BKD
2.	Penelitian DPPA Perangkat Daerah oleh Tim Peneliti DPPA Perangkat Daerah	Surat Edaran Bupati tentang Penyusunan DPPA-Perangkat Daerah, Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2017, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2017, Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2017	Minggu ke-1 s/d ke 2 bulan November 2017	BKD
3.	Pengesahan DPPA Perangkat Daerah	Surat Edaran Bupati tentang Penyusunan DPPA-Perangkat Daerah, Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2017, Perda Perubahan APBD TA 2017, Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2017	Minggu ke-2 bulan November 2017	BKD

Keterangan:

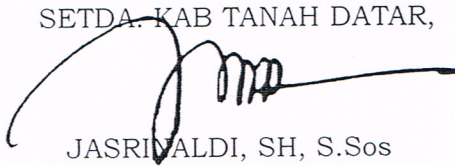
Kalender kegiatan ini akan mengalami penyesuaian dalam pelaksanaannya dengan mengikuti pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan atau belum diterbitkannya Pedoman Teknis oleh Pemerintah.

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA. KAB TANAH DATAR,



JASRINALDI, SH, S.Sos  
NIP. 19671130 199202 1 002